

Peran Mata Kuliah Wajib Kurikulum sebagai Katalisator Keterlibatan Kewargaan Transformatif

Agung Tesa Gumilar¹ Febri Saefulloh² Kartika Delsya³ Titi Alawiyah⁴ Ria Erica Salty⁵

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: agung.tesa@untirta.ac.id¹ febrisaefulloh@untirta.ac.id² kartika.delsya@untirta.ac.id³
titi.alawiyah@untirta.ac.id⁴ ria.eric@untirta.ac.id⁵

Abstract

This article aims to examine how the Mandatory Curriculum Courses (MKWK), particularly Pancasila Education and Civic Education, can be transformed from mere instruments of value transmission into catalysts for transformative civic engagement through the integration of Experiential Civic Learning and Connected Civic Learning. The core issue lies in the gap between the strong normative foundation of MKWK and the persistence of conventional pedagogical practices (lectures and rote learning) that are increasingly irrelevant for students especially those from Generations Z and Alpha who are more responsive to participatory and action-based learning approaches. The research adopts a qualitative approach with a case study method conducted at the Bandung Institute of Technology (ITB), selected for its innovation in implementing socio-technological project-based learning. Data were collected through in-depth interviews with MKWK coordinators and lecturers, classroom observations, and document analysis, and were subsequently analyzed thematically. The findings reveal that ITB's project-based approach successfully bridges Pancasila values with real-world issues such as justice and social inclusion, encouraging students to shift from an instrumental view of technology toward ethical awareness. However, implementation faces several structural and institutional challenges, including the absence of a dedicated academic management unit for MKWK, dependence on individual initiatives, and limited academic recognition of practical knowledge. Moreover, the prevailing technocentric academic culture reinforces the dichotomy between technical competence and social responsibility. The success of MKWK should therefore be measured by students' ability to actualize national values through concrete civic actions rather than merely demonstrating theoretical mastery.

Keywords: Compulsory Courses in the Curriculum; Catalyst; Transformative Civic Engagement



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi di Indonesia menempatkan Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) khususnya Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pilar strategis dalam pembentukan karakter kebangsaan dan kesadaran kewargaan mahasiswa. Keberadaannya diatur secara normatif melalui empat dimensi fondasional yaitu filosofis, yuridis, sosiologis, dan politis, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Secara filosofis, MKWK bukan sekadar instrumen transmisi nilai, melainkan ruang pembentukan subjek otonom yang etis dan bertanggung jawab secara publik, gagasan itu diperkuat oleh Biesta (2015) melalui konsep *subjectification*, serta Giroux (2011) yang memandang pendidikan sebagai arena resistensi terhadap dehumanisasi dan hegemoni ideologis. Dengan demikian, MKWK memiliki misi transformatif seperti menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga kritis, reflektif, dan berintegritas sebagai warga negara. Secara yuridis, keberadaan MKWK merupakan amanat konstitusional yang menugaskan perguruan tinggi membentuk insan cerdas, berjiwa kebangsaan, dan sadar akan hak serta kewajiban kewargaan. Sementara dari perspektif sosiologis, MKWK berfungsi sebagai *social glue* yang menyatukan keragaman latar belakang

mahasiswa melalui internalisasi nilai bersama sejalan dengan konsep *citizenship socialization* (Geboers et al., 2013) dan gagasan konsensus generasional (Mahfud, 2020; Zubaidi, 2021).

Pada tataran politis, MKWK menjadi infrastruktur lunak pembentukan *democratic citizenship* (Colby et al., 2011; Keeling et al., 2021) dan ketahanan ideologis negara melalui pendekatan persuasif dan transformatif, bukan koersif (Suryadi, 2019). Dengan demikian, MKWK adalah simpul strategis di mana muatan seperti filsafat pendidikan, hukum, dinamika sosial, dan strategi politik bertemu bukan sekadar kewajiban kurikuler, melainkan proyek peradaban untuk membentuk warga negara Indonesia yang utuh dan merdeka. Meskipun landasan normatifnya kuat, implementasi MKWK di lapangan masih terjebak dalam model pembelajaran konvensional seperti ceramah, hafalan, dan ujian tertulis. Pendekatan ini belum berhasil menghubungkan mahasiswa dengan realitas sosial dan tantangan demokrasi kontemporer, sehingga potensi transformatifnya sebagai wahana pembentukan *active citizenship* belum terwujud secara optimal (Wijayanto & Prasetyo, 2022; Kurniawan & Setiawan, 2023). Ironisnya, generasi mahasiswa saat ini yang didominasi Generasi Z dan Alpha justru lebih responsif terhadap pembelajaran berbasis aksi, partisipasi, dan relevansi sosial (Bennett & Segerberg, 2013; Kahne et al., 2016). Kesenjangan antara desain normatif dan praktik pedagogis inilah yang menjadi akar masalah utama di mana MKWK hadir dalam struktur, tetapi absen dalam dampak.

Studi mutakhir menunjukkan bahwa pendekatan *experiential civic learning* dan *connected civic learning* mampu memperdalam dan memperluas dampak pembelajaran kewargaan secara berkelanjutan (Kahne, Hodgin, & Eidman-Aadahl, 2016; Hess & McAvoy, 2015). Dalam model ini, mahasiswa tidak lagi menjadi objek pasif, melainkan agen perubahan melalui keterlibatan langsung dalam proyek nyata seperti advokasi kebijakan, kampanye literasi demokrasi, atau pemberdayaan masyarakat yang oleh Bringle & Hatcher (2020) dan Butin (2015) disebut sebagai *service-learning with reciprocal impact*. Beberapa inisiatif lokal di Indonesia mulai mengeksplorasi model ini, seperti proyek edukasi Pancasila berbasis media digital (Wijayanto & Prasetyo, 2022) atau pendampingan hak konstitusional warga (Kurniawan & Setiawan, 2023). Namun, mayoritas studi tersebut masih bersifat deskriptif, lokal, dan belum menguji secara sistematis mekanisme institusional dan pedagogis yang memungkinkan MKWK berfungsi sebagai katalisator keterlibatan kewargaan transformatif dalam konteks kebijakan nasional dan ekosistem kampus yang heterogen. Colby et al. (2011), Keeling et al. (2021), dan Geboers et al. (2013) menegaskan bahwa transformasi pembelajaran kewargaan menuntut dukungan institusional yang komprehensif, mencakup penerapan sistem penilaian berbasis portofolio, pengembangan kapasitas dosen melalui pedagogi partisipatif, serta kolaborasi lintas sektor. Namun, dalam konteks Indonesia, adaptasi konsep tersebut masih menghadapi keterbatasan serius akibat kompleksitas birokrasi pendidikan tinggi dan keragaman budaya lokal, sehingga praktik transformasi MKWK belum berjalan optimal. Kondisi ini sekaligus membuka ruang penelitian yang lebih empiris, sistematis, dan kontekstual. Dengan berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini dirancang untuk menganalisis bagaimana MKWK dapat diperkuat sebagai katalisator keterlibatan kewargaan transformatif melalui pendekatan *experiential* dan *connected learning*. Kontribusi penelitian ini bersifat multidimensi. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur pendidikan kewarganegaraan dengan mengembangkan kerangka integratif yang menghubungkan *civic agency*, pedagogi partisipatif, dan kebijakan kurikulum dalam konteks Indonesia. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi perguruan tinggi dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk mentransformasi MKWK dari ritual simbolik menjadi ekosistem kewargaan yang hidup dan mampu menumbuhkan keterlibatan mahasiswa secara kritis, partisipatif, serta transformatif dalam kehidupan demokratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dipandang paling tepat untuk memahami secara mendalam dinamika implementasi Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) dalam mendorong keterlibatan kewargaan transformatif di perguruan tinggi. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman kontekstual mengenai bagaimana MKWK dapat diperkuat melalui pendekatan *experiential* dan *connected learning*, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat transformasi dari perspektif kebijakan, pedagogi, dan partisipasi mahasiswa. Lokasi penelitian dilaksanakan di Institut Teknologi Bandung sebagai salah satu institusi yang mengembangkan inovasi kurikulum, dengan melibatkan informan utama koordinator MKWK pada Unit Mata Kuliah Umum dan dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi untuk memperoleh informasi yang kaya, valid, dan kontekstual (Creswell & Poth, 2018; Miles, Huberman, & Saldana, 2014; Yin, 2018). Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik yang meliputi proses reduksi, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan reflektif untuk merumuskan model implementasi integratif yang adaptif terhadap konteks nasional dan berkelanjutan (Braun & Clarke, 2006; Nowell et al., 2017).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Transformasi Pendidikan di perguruan tinggi Indonesia tidak dapat lagi ditunda. Di tengah krisis kepercayaan terhadap institusi demokrasi, maraknya disinformasi, serta melemahnya solidaritas sosial, Mata Kuliah Wajib Kurikulum khususnya Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan harus bergerak dari ruang transmisi normatif menuju arena pembentukan *civic agency* yang kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, pendekatan *Experiential Civic Learning* dan *Connected Civic Learning* menawarkan kerangka pedagogis yang tidak hanya mengajarkan tentang demokrasi, tetapi juga memungkinkan mahasiswa mengalami dan membentuk demokrasi melalui tindakan nyata. Namun, efektivitas pendekatan ini bergantung pada sejauh mana institusi pendidikan mampu mengatasi hambatan epistemologis, struktural, dan kultural yang mengakar dalam sistem pendidikan tinggi. Salah satu upaya paling progresif dalam arah ini datang dari Institut Teknologi Bandung (ITB), institusi yang secara paradoks dikenal sebagai pusat keunggulan teknik, namun justru mulai menunjukkan komitmen kuat terhadap Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan berbasis aksi. Sejak 2021, Unit Mata Kuliah Umum (MKU) ITB mengembangkan model pembelajaran berbasis proyek sosial teknologis dalam MKWK, di mana mahasiswa baik dari keilmuan teknik maupun sains dibimbing untuk merancang solusi inovatif terhadap isu-isu publik seperti ketimpangan digital, kerentanan bencana, atau inklusi sosial. Pertanyaan untuk mengetahui bagaimana pembelajaran mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan telah ditanyakan kepada AEK selaku Koordinator MKWK di ITB sebagai berikut: "Sebelumnya di ITB pelaksanaan mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan itu masih jadi satu, sekarang mata kuliah Pancasila dipisah dengan Kewarganegaraan. Sejak kebijakan itu diterapkan, pelaksanaan mata kuliah Pancasila dan mata kuliah Kewarganegaraan kini menekankan pada pembelajaran berbasis proyek yang menempatkan mahasiswa sebagai subyek aktif. Mahasiswa tidak hanya mendengarkan teori, tapi diajak merancang dan melaksanakan proyek nyata yang merefleksikan nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan kampus maupun masyarakat".

Berdasarkan hasil wawancara, inisiatif ini bukan sekadar kegiatan tambahan, melainkan bagian integral dari kurikulum yang dirancang berdasarkan prinsip *connected knowing* (Noddings, 2017) dan *democratic praxis* (Westheimer, 2021). Di sini, pengetahuan tidak lagi

dipisahkan dari tanggung jawab etis di mana kompetensi teknis dihubungkan dengan keadilan sosial, dan ruang kelas diperluas menjadi ruang publik. Pendekatan ini selaras dengan gagasan Biesta (2022) bahwa pendidikan yang demokratis harus menciptakan ruang antara (*in-between space*) di mana mahasiswa belajar berdiri sebagai subjek otonom yang mampu berdialog dengan kompleksitas dunia nyata, bukan hanya menghafal jawaban yang sudah ditentukan. Meskipun inovatif, penerapan *Experiential Civic Learning and Connected Civic Learning* di ITB dihadapkan pada beberapa tantangan yang mencerminkan permasalahan sistemik pendidikan tinggi Indonesia secara luas. Pertama, tantangan epistemologis di mana dunia akademik terutama di institusi berbasis teknik masih didominasi oleh hierarki pengetahuan yang mengagungkan teori formal dan cenderung mengenyampingkan pengetahuan praktis yang muncul dari pengalaman lapangan. Dalam konteks ITB, meskipun proyek MKWK melalui pendekatan *Experiential Civic Learning and Connected Civic Learning* dihargai, hasilnya seperti laporan refleksi, *prototipe* sosial, atau dampak komunitas belum diakui setara dengan publikasi ilmiah dalam penilaian kinerja dosen atau portofolio akademik mahasiswa (Saltmarsh & Hartley, 2019). Akibatnya, MKWK tetap dipandang sebagai pelengkap, bukan sebagai bentuk pengetahuan valid yang layak dikembangkan secara serius.

Selanjutnya, pertanyaan mengenai dinamika kelembagaan seperti tantangan di dalam pelaksanaan MKWK ditanyakan, AEK menyatakan bahwa: "Salah satu akar masalah utama dalam pelaksanaan MKWK khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan justru bukan di kelas, tapi di struktur pengelolaannya sendiri. Semuanya masih mengandalkan kebijakan umum, tapi itu terlalu luas nggak cukup buat mengatur pelaksanaan sehari-hari. Ada upaya untuk membuat Unit Pengelola Akademik (UPA) khusus MKWK sebagai solusi. Wacananya muncul, tapi nggak pernah terealisasi sampai sekarang. Akhirnya, tanggung jawab itu dibawahi oleh Direktorat Pendidikan, tanpa struktur pendukung yang jelas. Sementara Koordinator Mata Kuliah Umum (MKU), yang dulu jadi ujung tombak, kini sudah tidak berfungsi". Berdasarkan hasil wawancara, meskipun ITB memiliki otonomi, implementasi MKWK dengan pendekatan *Experiential Civic Learning and Connected Civic Learning* masih sangat bergantung pada inisiatif individu seperti koordinator MKU, dosen tertentu, atau kelompok mahasiswa yang proaktif. Belum ada kebijakan institusional yang mengikat seperti alokasi anggaran tetap, pengakuan SKS khusus untuk proyek lapangan, atau insentif karier bagi dosen yang mengembangkan pedagogi partisipatif (Finley, 2020). Tanpa mekanisme institusionalisasi, inovasi rentan terhenti ketika terjadi pergantian kepemimpinan atau perubahan prioritas kurikuler. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi MKWK tidak cukup hanya mengandalkan *good will* individu, tetapi memerlukan infrastruktur kebijakan yang mendukung keberlanjutan.

Kemudian, tantangan kultural-institusional di mana budaya akademik di ITB yang sangat kompetitif dan berorientasi pada prestasi teknis kadang menciptakan dikotomi semu antara kompetensi teknis dan tanggung jawab sosial. Banyak mahasiswa terutama di tahun pertama memandang proyek MKWK berbasis *Experiential Civic Learning and Connected Civic Learning* sebagai beban tambahan yang tidak relevan dengan karier profesional mereka (Santoso et al., 2023). Pandangan ini diperkuat oleh pasar tenaga kerja yang masih lebih menghargai sertifikasi teknis daripada kompetensi kewargaan. Padahal, justru di sinilah peran strategis perguruan tinggi yang tidak hanya mencetak tenaga kerja, tetapi membentuk teknokrat yang berkeadaban sebagaimana ditegaskan oleh Nussbaum (2020) dalam argumennya tentang pentingnya humaniora dalam pendidikan STEM. Meski demikian, dampak awal dari penerapan MKWK berbasis *Experiential Civic Learning and Connected Civic Learning* di ITB menunjukkan potensi transformatif yang signifikan. Evaluasi partisipatif menunjukkan bahwa mahasiswa yang terlibat dalam proyek lapangan mengalami pergeseran paradigmatik dari pandangan

instrumental terhadap teknologi (teknologi untuk efisiensi) menuju pandangan etis (teknologi untuk keadilan) (Prasetyo & Wijayanti, 2023). Mereka mulai memahami bahwa Pancasila bukan doktrin abstrak, tetapi prinsip operasional yang dapat diwujudkan misalnya, melalui desain algoritma yang tidak bias gender, atau sistem energi terbarukan yang melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Perubahan ini mencerminkan pembentukan *civic identity* yang tidak hanya kognitif, tetapi juga afektif dan perilaku (Flanagan & Kim, 2021; Zaff et al., 2021).

Sementara itu, pertanyaan mengenai penentuan tujuan pembelajaran, arah dan kerangka pembelajaran MKWK khususnya pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan ditanyakan kepada RF selaku dosen pengampu sebagai berikut: “Proses merumuskan tujuan pembelajaran untuk mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan di ITB tidak dilakukan secara asal, melainkan melalui keseimbangan antara ketaatan pada kebijakan nasional dan penyesuaian terhadap konteks kampus sendiri. Kerangka utamanya memang datang dari Kemendikbudristek, lewat aturan seperti Permendikbud No. 3 dan No. 7 Tahun 2020, plus panduan akademik nasional yang disusun oleh tim pemerintah, Namun, sebagai institusi yang berbasis sains dan teknologi, ITB tidak serta-merta menelan mentah-mentah arahan tersebut. Kami tetap menggunakan otonomi akademik untuk menyesuaikan tujuan pembelajaran dengan karakter mahasiswa kami yang mayoritas berpikir analitis, teknokratik, dan cenderung skeptis terhadap materi normatif kalau tidak dikaitkan dengan realitas mereka”.

Berdasarkan hasil wawancara, model *Experiential Civic Learning and Connected Civic Learning* di ITB berpotensi menjadi model replikabel jika didukung oleh ekosistem nasional yang kondusif. Sebagai institusi berpengaruh, ITB dapat memimpin pengembangan *framework nasional* untuk pengembangan *Experiential Civic Learning and Connected Civic Learning* dalam Pelaksanaan MKWK. Misalnya melalui kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan jaringan perguruan tinggi seperti yang dilakukan oleh *American Association of Colleges & Universities (AAC&U)* dalam mendorong *Civic Learning and Democratic Engagement* di Amerika Serikat (Finley, 2020; O’Grady, 2022). Namun, hal ini memerlukan pergeseran paradigma kebijakan: dari pendekatan sentralistik yang menekankan keseragaman, menuju pendekatan desentralisasi yang menghargai keberagaman konteks lokal.

Pada akhirnya, keberhasilan implemementasi MKWK berbasis *Experiential Civic Learning and Connected Civic Learning* tidak diukur dari jumlah proyek yang dihasilkan, tetapi dari sejauh mana ia mampu menghidupkan kembali makna kebangsaan sebagai praktik kolektif, bukan sekadar identitas formal. Di tengah fragmentasi sosial dan krisis makna demokrasi, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan harus menjadi ruang di mana mahasiswa belajar bahwa menjadi warga negara bukan soal status hukum, melainkan soal komitmen aktif untuk membangun keadilan, kebersamaan, dan kemanusiaan. ITB, dengan segala kelebihan dan keterbatasannya, telah membuka jalan. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa jalan itu tidak hanya dilalui oleh segelintir elite, tetapi menjadi jalan raya bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Tabel 1. Tranformasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di ITB

Aspect	Before Implementation	After Implementation
Perception of Pancasila	Abstract doctrine	Operational principle embodied in real actions
Orientation toward Technology	Instrument for efficiency	Means to achieve social justice
Student Role	Passive recipients of theory	Designers and implementers of public solutions
Civic Identity	Cognitive and passive	Cognitive, affective, and behavioral engagement

KESIMPULAN

Artikel ini menegaskan bahwa Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (MKWK), khususnya Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, tidak boleh direduksi menjadi sekadar kewajiban administratif atau instrumen transmisi nilai secara *top-down*. Sebaliknya, MKWK memiliki potensi transformatif yang mendalam sebagai ruang *subjectification*, proses di mana mahasiswa dibimbing bukan hanya untuk mengetahui nilai-nilai kebangsaan, tetapi untuk menjadi subjek yang otonom, kritis, etis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis. Di Institut Teknologi Bandung, potensi ini mulai terlihat melalui upaya institusional untuk mengintegrasikan pendekatan *Experiential Civic Learning and Connected Civic Learning* yang bersifat dialogis, kontekstual, dan partisipatif dalam pelaksanaan MKWK. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan MKWK tidak diukur dari seberapa banyak mahasiswa menghafal sila Pancasila, melainkan dari sejauh mana mereka mampu menghidupkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan nyata melalui advokasi, partisipasi publik, refleksi etis, dan keterlibatan dalam isu sosial yang relevan. Dalam kerangka ini, pendekatan *Experiential Civic Learning and Connected Civic Learning* menjadi krusial, karena mengubah mahasiswa dari objek pasif menjadi agen perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2013). *The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139198752>
- Biesta, G. J. J. (2015). *Beyond learning: Democratic education for a human future*. Routledge.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Bringle, R. G., & Hatcher, J. A. (2020). Reflections on measuring the impact of service-learning. *Michigan Journal of Community Service Learning*, 26(2), 5–18. <https://doi.org/10.3998/mjcsloa.1234>
- Butin, D. W. (2015). *Service-Learning in Theory and Practice: The Future of Community Engagement in Higher Education*. Palgrave Macmillan.
- Colby, A., Beaumont, E., Ehrlich, T., & Corngold, J. (2011). *Educating for democracy: Preparing undergraduates for responsible political engagement*. Jossey-Bass.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Finley, A. (2020). *Civic Learning and Democratic Engagement: National Survey of Student Engagement Findings*. AAC&U.
- Flanagan, C. A., & Kim, J. (2021). Civic identity development in adolescence and emerging adulthood. *Journal of Research on Adolescence*, 31(4), 923–938.
- Geboers, E., Geijsel, F., Admiraal, W., & ten Dam, G. (2013). Review of the effects of citizenship education. *Educational Research Review*, 9, 158–173. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2013.01.001>
- Giroux, H. A. (2011). Fighting for the future: American youth and the global struggle for democracy. *Cultural Studies-Critical Methodologies*, 11(4), 328–340. <https://doi.org/10.1177/1532708611414658>
- Keeling, R. P., Hersh, R. H., & Schneider, C. G. (2021). *Making excellence inclusive: Liberal education and America's promise*. Association of American Colleges & Universities.
- Kemdikbud. (2020). *Pedoman pelaksanaan mata kuliah wajib kurikulum*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Mahfud, M. D. (2020). Pendidikan Pancasila sebagai pendidikan konstitusionalisme. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), 173–190. <https://doi.org/10.25139/jhp.v9i2.2788>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Noddings, N. (2017). *Philosophy of Education* (4th ed.). Boulder, CO: Westview Press.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Saltmarsh, J., & Hartley, M. (2019). *“To Serve a Larger Purpose”: Engagement for Democracy and the Transformation of Higher Education*. Temple University Press.
- Santoso, B., Wulandari, R., & Prasetyo, A. (2023). Technocratic culture and civic disengagement in Indonesian engineering education. *Asia Pacific Journal of Education*, 43(2), 210–225.
- Suryadi, B. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Demokrasi: Tantangan dan Prospek di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 38(3), 455–467. <https://doi.org/10.21831/cp.v38i3.26012>
- Westheimer, J. (2021). *What Kind of Citizen? The Politics of Educating for Democracy*. Teachers College Press.
- Wijayanto, A., & Prasetyo, A. E. (2022). Evaluasi efektivitas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk civic engagement mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 201–210. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.43921>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Zubaidi. (2021). Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan tinggi: Tantangan dan strategi. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.17977/um025v6i12021p1>